

## DETERMINAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH JAWA TIMUR

### *Determinants of Inter-Regional Inequality in East Java*

Abd Muis Kaimuddin<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Jln. Prof. Sudarto No 13, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*E-mail korespondensi: [abdulmuiskaimuddin@gmail.com](mailto:abdulmuiskaimuddin@gmail.com)

Diterima: 06 Januari 2024 | Direvisi: 28 Juni 2024 | Disetujui: 27 Desember 2024 | Publikasi online: 30 Desember 2024

#### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the factors that cause inequality in East Java. The method used in this study is multiple linear regression to see the effect of the independent variable on the dependent variable and LQ (Location Quotient) analysis to measure agglomeration using 38 district / city data in the 2017-2020 period. Based on the partial test results, it is found that agglomeration and economic growth has a positive and significant effect. Education has a negative and significant effect on inequality. Meanwhile, unemployment has no effect on inequality. The results of the LQ analysis found that there are eight regions that have leading sectors in the industrial sector.*

**Keywords:** *Inequality, Agglomeration, LQ*

#### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dan analisis LQ (Location Quotient) untuk mengukur aglomerasi dengan menggunakan 38 data Kabupaten/Kota dalam periode 2017-2020. Berdasarkan hasil uji secara parsial ditemukan bahwa aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sedangkan pengangguran memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan. Hasil analisis LQ ditemukan bahwa terdapat delapan daerah yang memiliki sektor unggulan pada sektor industri.*

**Kata kunci:** *Ketimpangan, Aglomerasi, LQ*



## PENDAHULUAN

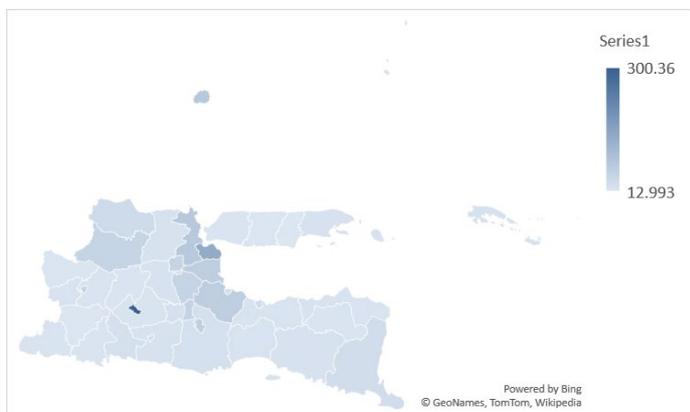
Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mensejahterakan masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan pengangguran. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi lebih sering digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu wilayah. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan pembangunan dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah (Liling Vera Yusica, 2018). Ketimpangan suatu wilayah dapat terjadi akibat perbedaan sumber daya alam, tingkat pendidikan, pengangguran dan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi indikator keberhasilan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan ketimpangan melalui pendapatan perkapita. Pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketimpangan pembangunan karena hanya terkonsentrasi pada pusat pertumbuhan. Karakteristik daerah yang dimanfaatkan secara optimal akan mendorong pertumbuhan, sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan secara optimal akan berdampak pada ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi sering kali terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di wilayah yang memiliki infrastruktur yang lebih baik. Sedangkan daerah yang memiliki potensi pertumbuhan yang rendah tidak akan mengalami pertumbuhan yang sama. Hal ini akan berpengaruh terhadap ketimpangan antar wilayah (Hendarmin, 2019).

Dalam gambar 1 ketimpangan antar daerah di Jawa Timur masih cukup tinggi, hal itu dapat dilihat dari perbedaan PDRB perkapita antar daerah yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam enam tahun terakhir. PDRB perkapita tertinggi adalah Kota Kediri dengan PDRB perkapita Rp. 300.361 pertahun, diikuti Kota Surabaya dengan pendapatan perkapita Rp. 138.429 pertahun, dan Kabupaten Gresik dengan pendapatan perkapita Rp. 65.797 pertahun. Sementara yang terendah adalah Kabupaten Pamekasan dengan pendapatan perkapita Rp. 12.993 pertahun, diikuti Kabupaten Sampang dengan pendapatan perkapita Rp. 14.254 pertahun, dan Kabupaten Ponorogo dengan pendapatan perkapita Rp. 15.495 pertahun (BPS).

**Gambar 1. PDRB perkapita Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam teori Weber terkait lokasi dimana industri lebih memilih berkumpul di lokasi yang memiliki biaya produksi rendah (termasuk biaya transportasi, tenaga kerja, dan bahan mentah), hal ini akan menyebabkan terjadinya aglomerasi pada suatu wilayah. Lokasi industri cenderung berlokasi di daerah perkotaan atau sekitaran perkotaan, dikarenakan industri akan memilih di lokasi yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Aglomerasi juga memberikan manfaat kepada perusahaan maupun konsumen dari pengelompokan industri (Kusumasari & Kartiasih, 2017). Aglomerasi industri akan berdampak pada pendapatan perkapita suatu wilayah karena penyerapan tenaga kerja. Daerah yang teraglomerasi akan mengalami peningkatan pendapatan perkapita dibandingkan dengan daerah yang tidak teraglomerasi, hal ini akan berpengaruh terhadap ketimpangan antar wilayah.

Tingginya tingkat pengangguran dapat berpengaruh terhadap penurunan pendapatan perkapita suatu wilayah. Daerah dengan tingkat pengangguran rendah cenderung memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini akan menciptakan perbedaan pendapatan perkapita antara daerah dengan pengangguran tinggi dan rendah, sehingga menyebabkan ketimpangan (Liling Vera Yusica, 2018).

Dalam teori human capital menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki pendidikan yang rendah, sehingga akan berpengaruh terhadap ketimpangan antar wilayah. Pada era globalisasi, inovasi memainkan peran penting dalam suatu perekonomian. Peningkatan inovasi dapat dicapai dengan tingkat pendidikan yang tinggi, hal ini kemudian berpengaruh terhadap pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang rendah pendidikannya.

Ketimpangan juga diteliti dalam penelitian (Liling Vera Yusica, 2018) yang menganalisis pengaruh pertumbuhan, aglomerasi, dan pengangguran terhadap ketimpangan di Kalimantan Timur. Dengan menggunakan analisis regresi data panel ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Kalimantan Timur.

Dalam penelitian (Kusumasari & Kartiasih, 2017) yang menganalisis terkait aglomerasi industri dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2010-2014. Dengan menggunakan analisis regresi data panel ditemukan bahwa terdapat delapan daerah yang teraglomerasi. Aglomerasi industri, infrastruktur, modal, modal manusia, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

(Hendarmin, 2019) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan modal manusia terhadap ketimpangan antar wilayah di Kalimantan Barat dengan menggunakan analisis regresi data panel sebagai model penelitian. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, aglomerasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, sedangkan modal manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Kalimantan Barat

Ketimpangan yang diteliti oleh (Anggraeni & Aulia, 2019) terkait determinan ketimpangan di Kabupaten Gresik. Analisis yang digunakan adalah indeks Williamson untuk ketimpangan dan analisis korelasi menggunakan SPSS. Hasil menunjukkan bahwa terdapat dua kecamatan yang memiliki ketimpangan rendah dan faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Gresik adalah PDRB perkapita, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, tenaga kerja industri dan pertanian, panjang jalan aspal, jumlah penduduk SMA, migrasi, fasilitas SMP, rumah sakit, dan puskesmas.

(Khoirudin & Musta'in, 2020) yang meneliti ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggunakan data panel dari tahun 2012-2018. Analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.

(Sodik & Iskandar, 2007) yang menganalisis terkait aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan data panel 26 Provinsi di Indonesia dan menggunakan metode Generalized Least Square (GLS) ditemukan bahwa yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah angkatan kerja, inflasi, dan opennes rate Provinsi. Sementara aglomerasi dan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

(Ngakan Putu Mahesa Eka Raswita, 2013) menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar. Alat analisis menggunakan tipologi klassen, indeks Williamson, dan regresi kurva. Hasil tipologi klassen menunjukkan bahwa Kecamatan Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, dan Teggalang berada pada kuadran IV, Kecamatan Payangan berada pada kuadran III, Kecamatan Tampaksiring berada pada kuadran II, Kabupaten Ubud berada pada kuadran I. Indeks Williamson menunjukkan terjadi peningkatan ketimpangan dengan nilai rata-rata 0.300. kurva indeks Williamson dan pendapatan perkapita menunjukkan terjadi ketimpangan U terbalik.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis PDRB, aglomerasi, pengangguran, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur dan analisis LQ dalam penentuan aglomerasi Kabupaten/Kota Jawa Timur. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penggunaan metode LQ sebagai aglomerasi sekaligus analisis sektor unggulan dalam sektor industri antar daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian menggunakan data panel Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2017-2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi operasional ketimpangan yang digunakan merujuk pada (Bonet, 2006) dalam (Liling Vera Yusica, 2018) yaitu ketimpangan dihitung dari PDRB perkapita (ribu rupiah), Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Kabupaten/Kota (Juta

rupiah), pengangguran yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota (persen), pendidikan yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dalam (persen), dan aglomerasi yang digunakan adalah perhitungan Location Quotient (LQ). Selain menganalisis determinan ketimpangan di Jawa Timur, penelitian ini juga akan menganalisis aglomerasi di Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota dengan LQ.

Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan data panel. Adapun persamaan model sebagai berikut:

$$\ln KT_{it} = \beta_1 + \beta_2 \ln AG_{it} + \beta_3 \ln PDRB_{it} + \beta_4 \ln RLS_{it} + \beta_5 \ln TPT_{it} + e$$

Dimana KT adalah ketimpangan, AG adalah aglomerasi, PDRB adalah pertumbuhan ekonomi, RLS adalah pendidikan, TPT adalah pengangguran,  $\beta_1$  adalah konstanta,  $\beta_2$ - $\beta_6$  adalah koefisien regresi,  $i$  adalah Kabupaten/Kota Jawa Timur (cross section),  $t$  adalah time series,  $e$  adalah error.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan wilayah yang dilakukan dengan PDRB perkapita menunjukkan semakin timpang ketika semakin besar atau positif dan nilai kecil dan negatif menunjukkan ketimpangan wilayah yang kecil. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa ketimpangan tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Kediri dengan nilai 6.436, diikuti Kota Surabaya dengan nilai 2.426. Sedangkan ketimpangan terendah adalah Kabupaten Pamekasan dengan nilai -0.678 diikuti Kabupaten Sampang dengan nilai -0.646.

**Tabel 1. Tabel Ketimpangan Jawa Timur**

Kab/Kota	Rata-rata	Kab/Kota	Rata-rata
Pacitan	-0.529	Magetan	-0.505
Ponorogo	-0.617	Ngawi	-0.609
Trenggalek	-0.564	Bojonegoro	0.282
Tulungagung	-0.378	Tuban	-0.081
Blitar	-0.479	Lamongan	-0.470
Kediri	-0.558	Gresik	0.875
Malang	-0.369	Bangkalan	-0.570
Lumajang	-0.493	Sampang	-0.646
Jember	-0.472	Pamekasan	-0.678
Banyuwangi	-0.197	Sumenep	-0.466
Bondowoso	-0.570	Kota Kediri	6.436
Situbondo	-0.517	Kota Blitar	-0.191
Probolinggo	-0.507	Kota Malang	0.493
Pasuruan	0.591	Kota Probolinggo	-0.153
Sidoarjo	0.582	Kota Pasuruan	-0.295
Mojokerto	0.282	Kota Mojokerto	-0.079
Jombang	-0.467	Kota Madiun	0.369
Nganjuk	-0.586	Kota Surabaya	2.426
Madiun	-0.547	Kota Batu	0.332

Sumber: Perhitungan Peneliti

Hasil analisis yang dihitung berdasarkan LQ dengan nilai rata-rata menunjukkan terdapat delapan daerah yang memiliki sektor unggulan pada sektor industri yaitu Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pasuruan. Nilai LQ tertinggi adalah Kota Kediri mencapai 2.64 dan yang terendah adalah Kabupaten Bangkalan mencapai 0.07. Nilai LQ menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Nilai Aglomerasi Jawa Timur**

Kabupaten/kota	Nilai LQ	Kabupaten/kota	Nilai LQ
Pacitan	0.231	Magetan	0.363
Ponorogo	0.253	Ngawi	0.292
Trenggalek	0.419	Bojonegoro	0.167
Tulungagung	0.729	<b>Tuban</b>	<b>1.014</b>
Blitar	0.465	Lamongan	0.339
Kediri	0.691	<b>Gresik</b>	<b>1.609</b>
<b>Malang</b>	<b>1.036</b>	Bangkalan	0.077
Lumajang	0.705	Sampang	0.122
Jember	0.720	Pamekasan	0.224
Banyuwangi	0.400	Sumenep	0.196
Bondowoso	0.746	<b>Kota Kediri</b>	<b>2.642</b>
Situbondo	0.617	Kota Blitar	0.304
Probolinggo	0.820	<b>Kota Malang</b>	<b>1.348</b>
<b>Pasuruan</b>	<b>1.975</b>	Kota Probolinggo	0.518
<b>Sidoarjo</b>	<b>1.719</b>	Kota Pasuruan	0.639
<b>Mojokerto</b>	<b>1.837</b>	Kota Mojokerto	0.350
Jombang	0.690	Kota Madiun	0.532
Nganjuk	0.476	Kota Surabaya	0.638
Madiun	0.394	Kota Batu	0.239

Sumber: Perhitungan Peneliti

Berdasarkan hasil pemilihan model terbaik (uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier) didapatkan model terpilih yang akan digunakan adalah Fixed Effect (FE). Adapun estimasi output model Fixed Effect sebagai berikut:

**Tabel 3. Estimasi Output Fixed Effect**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob	Hipotesis
AG	0.19	0.05	3.21	0.00***	Positif dan Signifikan
PDRB	3.09	4.18	7.39	0.00***	Positif dan signifikan
RLS	-0.04	0.01	-4.46	0.00***	Positif dan signifikan
TPT	0.00	0.00	1.27	0.20	Positif dan signifikan
C	0.08	0.08	0.99	0.32	
F-Statistik	F-tabel		t-tabel	R-squared	Prob(f-statistik)
8198.551	2.50		1.69	0.99	0.00

Catatan: \*\*\* adalah tingkat signifikansi pada 5 persen.

Berdasarkan tabel 3, maka persamaannya sebagai berikut:

$$KT = 0.9*AG + 3.09*PDRB - 0.04*RLS + 0.00*TPT + e$$

### Uji F

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai F-statistik sebesar (8198.551) > f-tabel (2.50) dan nilai probabilitas sebesar 0.00 < 0.05. Artinya secara keseluruhan semua variabel independen (aglomerasi, PDRB, pendidikan, dan tingkat pengangguran) berpengaruh atau mempengaruhi ketimpangan di Jawa Timur.

### **Uji R-square**

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai r-square sebesar 0.99. Artinya secara keseluruhan semua variabel independen (aglomerasi, PDRB, pendidikan, dan tingkat pengangguran) dapat menjelaskan ketimpangan sebesar 99%, sedangkan 1% dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian.

### **Pembahasan:**

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai C atau konstanta adalah 0.08. Artinya apabila keseluruhan variabel independen (aglomerasi, PDRB, pendidikan, dan pengangguran) tidak berubah atau konstan, maka ketimpangan akan naik sebesar 0.08%.

### **Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan**

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa Aglomerasi memiliki hubungan positif dengan ketimpangan. Hasil uji t menunjukkan bahwa aglomerasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Timur, hal itu dapat dilihat dari nilai t-statistik (3.21) > t-tabel (1.69) dan nilai prob 0.00 < 0.05. Artinya apabila aglomerasi naik sebesar 1 persen, maka ketimpangan akan naik sebesar 0.19 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan aglomerasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan

Hasil ini mengkonfirmasi teori Weber terkait lokasi dimana industri lebih memilih berkumpul di lokasi yang memiliki biaya produksi rendah (termasuk biaya transportasi, tenaga kerja, dan bahan mentah). Sehingga daerah yang memiliki biaya produksi rendah lebih berpotensi pada peningkatan industri daripada daerah yang tidak memiliki, hal ini yang kemudian membuat ketimpangan pada aglomerasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Liling Vera Yusica, 2018) yang menemukan bahwa aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan.

### **Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan**

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan negatif dengan ketimpangan. Hasil uji t menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan Jawa Timur, hal itu dapat dilihat dari nilai t-statistik (-4.46) > t-tabel (1.69) dan nilai prob 0.00 < 0.05. Artinya apabila tingkat pendidikan naik sebesar 1 persen, maka ketimpangan akan turun sebesar -0.14 persen. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan

Tingkat pendidikan dapat mendorong peningkatan SDM sehingga lebih mudah dalam mendorong pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah. Hasil ini mengkonfirmasi teori human capital yang menyatakan bahwa peningkatan investasi SDM melalui pendidikan akan dapat meningkatkan tingkat produktivitas sehingga mendorong pendapatan yang akan mengurangi ketimpangan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Hendarmin, 2019) yang menemukan pendidikan (modal manusia) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.

### **Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan**

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa PDRB memiliki hubungan positif dengan ketimpangan. Hasil uji t menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan ketimpangan, hal itu dapat dilihat dari nilai t-statistik (7.39) > t-tabel (1.69) dan nilai prob 0.00 < 0.05. Artinya apabila PDRB naik sebesar 1 persen, maka ketimpangan akan naik sebesar 3.09 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis ketiga yang menyatakan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.

Peningkatan PDRB dapat menimbulkan ketimpangan, terutama daerah yang memiliki tingkat PDRB yang tinggi dan rendah. Daerah yang memiliki PDRB tinggi cenderung berkembang lebih cepat daripada daerah yang PDRB rendah, hal ini akan menyebabkan ketimpangan pada pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Hendarmin, 2019) yang menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan.

### **Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan**

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa pengangguran memiliki hubungan positif dengan ketimpangan. Hasil uji t menunjukkan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan, hal itu dapat dilihat dari nilai t-statistik (1.27) < t-tabel (1.69) dan nilai prob 0.20 > 0.05. Hasil ini tidak sesuai hipotesis keempat yang menyatakan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan

Hasil ini tidak sesuai konsep pengangguran struktural yang menyatakan bahwa ketrampilan atau kualitas tenaga kerja tidak sesuai dengan permintaan di pasar tenaga kerja akan menimbulkan ketimpangan. Hal ini mungkin sesuai dengan konsep pengangguran friksional yang menyatakan pengangguran dapat terjadi karena waktu jeda atau tunggu antara pekerjaan lama dan baru. Sehingga pengangguran tidak mempengaruhi ketimpangan, karena pengangguran hanya sementara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan data Kabupaten/Kota ditemukan terjadi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Adapun faktor penyebab yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan adalah aglomerasi, PDRB, dan tingkat pendidikan. Dari hasil uji ditemukan bahwa yang memiliki pengaruh besar dalam ketimpangan di Jawa Timur adalah PDRB dengan koefisien 3.09.

Berdasarkan data pendidikan, daerah dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep. Sedangkan daerah dengan tingkat pendidikan terendah adalah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Dalam teori human capital terkait investasi modal manusia, dimana peningkatan pendidikan akan meningkatkan SDM dan tingkat produktivitas. Sementara dalam kasus Kabupaten Bangkalan yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi di Jawa Timur justru memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dalam periode penelitian.

Hasil analisis LQ menunjukkan terdapat delapan daerah yang sudah teraglomerasi. Adapun daerah tersebut adalah Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi, daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Sedangkan daerah dengan tingkat pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data tingkat pengangguran, daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Kota Malang dan Kota Surabaya. Sedangkan daerah dengan tingkat pengangguran terendah adalah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Situbondo

Kesimpulan di atas menegaskan terkait pentingnya kebijakan yang dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan antar wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pembangunan yang inklusif dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta dapat menjadi refrensi bagi penelitian kedepan yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, R. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 6(1), 42–53. <https://doi.org/10.15294/jejak.v6i1.3747>
- Anggraeni, N., & Aulia, B. U. (2019). Penentuan Tingkat Kesenjangan Wilayah dan Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan di Kabupaten Gresik. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.33551>
- BPS. <https://jatim.bps.go.id/>
- Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Colombian experience. *Annals of Regional Science*, 40(3), 661–676. <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0060-z>
- Hendarmin, H. (2019). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 245. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.11186>
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Kusumasari, A., & Kartiasih, F. (2017). Aglomerasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 2010-2014. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 9(2), 28–41.
- Liling Vera Yusica, N. M. Z. A. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Lmu Ekonomi*, Vol 2(Jilid 2), 230–240.
- Ngakan Putu Mahesa Eka Raswita, M. S. U. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan

Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*, 1–10.  
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1356630&val=981&title=Analisis  
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1356630&val=981&title=Analisis%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20dan%20Ketimpangan%20Pendapatan%20Antar%20Kecamatan%20di%20Kabupaten%20Gianyar)

Sodik, J., & Iskandar, D. (2007). Aglomerasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8, 117–129.